



## Implementasi E-Government di Tingkat Desa: Analisis Ketersediaan dan Kemutakhiran Konten Informasi Publik di Desa Soreang Kab Takalar

**Penulis:**

Muh Fadli Fauzi Sahlan<sup>1</sup>, Supriadi Syam<sup>2</sup>, Sahabuddin<sup>3</sup>, Abdillah SAS<sup>4</sup>

**Afiliasi:**

Universitas Bosowa, Indonesia<sup>1234</sup>

**Email:**

[fadli.fauzi@universitasbosowa.ac.id](mailto:fadli.fauzi@universitasbosowa.ac.id)<sup>1</sup>, [supriadisiam@universitasbosowa.ac.id](mailto:supriadisiam@universitasbosowa.ac.id)<sup>2</sup>, [sahabuddin@universitasbosowa.ac.id](mailto:sahabuddin@universitasbosowa.ac.id)

<sup>3</sup>, [abdillah.sas@universitasbosowa.ac.id](mailto:abdillah.sas@universitasbosowa.ac.id)<sup>4</sup>



©2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License-(CC-BY-SA) (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

DOI : <https://doi.org/10.33701/jtpm.v6i1.5967>

**\*Penulis Korespondensi**

Nama: Muh Fadli Fauzi Sahlan

Afiliasi: Universitas Bosowa

Email: [fadli.fauzi@universitasbosowa.ac.id](mailto:fadli.fauzi@universitasbosowa.ac.id)

Diterima: 29 Desember 2025

Direvisi: 30 Maret 2026

Publikasi Online: 23 Juni 2026

### Abstract

*The implementation of e-government at the village level is crucial for enhancing public service transparency and accountability. This study aims to evaluate the implementation of e-government in Soreang Village, Takalar Regency, by analyzing the availability and up-to-dateness of public information content on the village's official website. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through digital observation (web-tracing), documentation studies of Permendesa No. 13 of 2025 and Permen Komdigi No. 5 of 2025, and structured interviews with the website administrator. The results indicate that the website meets 77.8% of the mandatory menu requirements, with weaknesses in the absence of APBDes realization reports and interactive public assistance features. Content updates are uneven; dynamic content such as news is regularly updated, while static content such as demographic data and organizational structure lags. This study concludes that e-government implementation in Soreang Village is still at the publish-oriented stage, focusing on one-way information publication rather than interactive service. Challenges include limited human resource capacity and bureaucratic data fragmentation. Holistic interventions are recommended, including continuous technical training, integrated information systems, and multi-level collaboration to achieve adaptive and accountable digital governance.*

**Keywords:** e-government, village website, information availability, content up-to-dateness, Soreang Village

### Abstrak

Implementasi e-government di tingkat desa sangat penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi e-government di Desa Soreang, Kabupaten Takalar, dengan menganalisis ketersediaan dan kemutakhiran konten informasi publik pada website resmi desa. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi digital (web-tracing), studi dokumentasi terhadap Permendesa No. 13 Tahun 2025 dan Permen Komdigi No. 5 Tahun 2025, serta wawancara terstruktur dengan admin website. Hasil penelitian menunjukkan bahwa website memenuhi 77,8% menu wajib, dengan kelemahan pada ketiadaan laporan realisasi APBDes dan fitur bantuan publik interaktif. Pembaruan konten tidak merata; konten dinamis seperti berita diperbarui secara berkala, sedangkan konten statis seperti data kependudukan dan struktur organisasi tertinggal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi e-government di Desa Soreang masih berada pada tahap berorientasi publikasi (publish-oriented), yang berfokus pada penyebaran informasi

satu arah daripada layanan interaktif. Tantangan yang dihadapi meliputi kapasitas sumber daya manusia yang terbatas dan fragmentasi data birokratis. Intervensi holistik direkomendasikan, termasuk pelatihan teknis berkelanjutan, sistem informasi terintegrasi, dan kolaborasi multilevel untuk mewujudkan tata kelola digital yang adaptif dan akuntabel.

**Kata kunci:** e-government, website desa, ketersediaan informasi, kemutakhiran konten, Desa Soreang

## PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan telah menjadi agenda global untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan publik. Di Indonesia, implementasi e-government di tingkat desa merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menuntut keterbukaan informasi bagi masyarakat perdesaan (Nurdin et al., 2022). Digitalisasi desa bukan sekadar penyediaan infrastruktur teknologi, melainkan upaya strategis untuk mendekatkan layanan pemerintah kepada warga dan meminimalisir asimetri informasi (Twizeyimana & Andersson, 2019). Dalam konteks ini, website desa berfungsi sebagai instrumen utama dalam penyebarluasan data pembangunan, anggaran, dan layanan administratif yang dapat diakses secara inklusif.

Penelitian mengenai e-government di tingkat desa menunjukkan konsentrasi yang beragam dalam lima tahun terakhir. Penelitian oleh Ramadhani et al. (2023) menekankan bahwa keberhasilan smart village sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia pengelola informasi. Sementara itu, studi yang dilakukan oleh Pratama dan Wijaya (2021) menyoroti bahwa banyak website desa di Indonesia yang mengalami fenomena "stagnasi konten," di mana situs web hanya berfungsi sebagai profil statis tanpa adanya pembaruan data yang berkala. Lebih lanjut, penelitian di tingkat kabupaten menunjukkan adanya fragmentasi digital akibat kurangnya standarisasi konten antar desa (Hidayat et al., 2024). Meskipun penelitian terdahulu telah banyak membahas aspek adopsi teknologi dan kendala teknis, masih terbatas penelitian yang secara spesifik membedah kualitas konten dari dua dimensi krusial secara bersamaan, yakni ketersediaan (availability) dan kemutakhiran (up-to-dateness) berdasarkan regulasi terbaru tahun 2025.

Pernyataan kebaruan ilmiah (scientific novelty) dalam artikel ini terletak pada analisis mendalam terhadap implementasi konten website desa dengan menggunakan tolok ukur regulasi terbaru, yakni Permendesa Nomor 13 Tahun 2025 dan Permen Komdigi Nomor 5 Tahun 2025. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya bersifat umum, penelitian ini mengambil lokasi di Desa Soreang, Kabupaten Takalar, untuk memetakan bagaimana sebuah desa di wilayah kabupaten berkembang mampu menjaga relevansi informasi publik di tengah tantangan integrasi data real-time. Masalah utama dalam penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara keberadaan platform digital (website resmi) dengan aktualitas informasi yang disajikan, yang berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap akuntabilitas pemerintah desa.

Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas implementasi e-government di Desa Soreang melalui analisis ketersediaan fitur informasi publik serta menguji kemutakhiran konten yang tersedia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pengelola desa dalam mewujudkan tata kelola informasi yang adaptif dan memenuhi standar pelayanan publik digital yang akuntabel.. (Garamond, 12 pt; Spasi 1)

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memberikan gambaran mendalam mengenai implementasi e-government di Desa Soreang, Kabupaten Takalar. Metode ini dipilih karena peneliti bertujuan untuk menganalisis fenomena secara naturalistik dengan menekankan pada kualitas dan aktualitas konten digital yang disajikan kepada publik (Creswell & Poth, 2018).

### 1. Objek dan Fokus Penelitian

- Objek penelitian ini adalah website resmi Desa Soreang dengan domain <https://soreang.berdesa1.id/>. Fokus analisis diarahkan pada dua dimensi utama:
  - Ketersediaan Konten: Meliputi keberadaan fitur layanan publik, transparansi anggaran, dan profil desa.
  - Kemutakhiran Konten: Meliputi frekuensi pembaruan berita, tanggal unggahan data APBDes, serta validitas informasi layanan mandiri.

### 2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memecahkan masalah penelitian, data dikumpulkan melalui tiga teknik utama:

- Observasi Digital (Web-Tracing): Melakukan penelusuran langsung pada seluruh menu dan fitur website Desa Soreang selama periode penelitian untuk mencatat status ketersediaan dan tanggal terakhir pembaruan konten.
- Studi Dokumentasi: Menelaah dokumen regulasi terkait, yaitu Permendesa No. 13 Tahun 2025 dan Permen Komdigi No. 5 Tahun 2025 sebagai instrumen standardisasi (benchmark) penelitian.
- Wawancara Terstruktur: Dilakukan dengan admin pengelola website desa (Operator Desa) untuk memahami hambatan teknis dan administratif dalam proses pembaruan konten secara real-time.

### 3. Instrumen Analisis Data

Masalah penelitian dipecah menggunakan teknik Analisis Konten (Content Analysis) yang dikombinasikan dengan matriks kepatuhan. Peneliti menyusun tabel kategorisasi berdasarkan standar informasi publik desa yang mencakup:

- Skor Ketersediaan (0-1): Ada atau tidak adanya menu wajib.
- Skor Kemutakhiran (Skala Likert): Mengukur apakah konten diperbarui secara harian, mingguan, bulanan, atau bahkan stagnan lebih dari satu tahun.

### 4. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga alur kegiatan secara bersamaan:

- Reduksi Data: Menyaring data mentah dari hasil observasi website dan hanya mengambil data yang relevan dengan aspek ketersediaan serta kemutakhiran informasi.
- Penyajian Data (Data Display): Menyajikan hasil analisis dalam bentuk tabel komparatif antara standar regulasi dengan kondisi riil di website Desa Soreang.
- Penarikan Kesimpulan: Merumuskan hasil akhir mengenai tingkat kematangan implementasi e-government di lokasi penelitian berdasarkan temuan di lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan metode yang diterapkan, penelitian ini mengungkap temuan-temuan mendalam mengenai implementasi e-government melalui website Desa Soreang

(<https://soreang.berdesa1.id/>). Analisis dilakukan terhadap dua dimensi utama, yaitu **ketersediaan** dan **kemutakhiran** konten informasi publik, dengan merujuk pada standar yang ditetapkan dalam Permendes Nomor 13 Tahun 2025 dan Permen Komdigi Nomor 5 Tahun 2025.

Observasi digital terhadap website Desa Soreang menunjukkan bahwa secara umum struktur website telah memuat beberapa menu dasar yang diperlukan. Berdasarkan matriks analisis yang disusun, ketersediaan konten dikategorikan ke dalam tiga komponen utama: **profil dan identitas desa, transparansi anggaran dan keuangan, serta layanan publik dan informasi aktivitas**. Tabel 1 menyajikan hasil penilaian ketersediaan menu dan fitur informasi berdasarkan standar regulasi.

**Tabel 1.** Hasil penilaian ketersediaan menu dan fitur informasi berdasarkan standar regulasi.

Kategori Konten	Menu/Fitur yang Diperiksa	Ketersediaan (Ada/Tidak)	Keterangan
Profil Desa	Visi & Misi Desa	Ada	Lengkap dan terstruktur
	Struktur Organisasi Pemerintah Desa	Ada	Dilengkapi nama dan jabatan
	Data Wilayah dan Kependudukan	Ada	Data statistik dasar tersedia
Transparansi Anggaran	APBDes (Rencana)	Ada	Dokumen dapat diunduh
	Laporan Realisasi APBDes	Tidak Ada	Tidak ditemukan menu khusus
	Informasi Pengadaan Barang/Jasa	Ada	Tersedia namun terbatas pada pengumuman umum
Layanan Publik	Formulir Administrasi (Surat Keterangan, dll.)	Ada	Tersedia dalam format unduhan
	Berita dan Kegiatan Desa	Ada	Terdapat menu "Berita"
	FAQ atau Bantuan Publik	Tidak Ada	Tidak tersedia fitur interaktif

Secara kuantitatif, dari 9 indikator yang diperiksa, 7 menu (77,8%) tersedia. Namun, temuan kritis terletak pada ketiadaan menu Laporan Realisasi APBDes dan FAQ/Bantuan Publik. Hal ini menunjukkan bahwa aspek akuntabilitas dan interaktivitas dengan masyarakat masih menjadi titik

lemah. Ketersediaan formulir administrasi yang dapat diunduh merupakan poin positif, karena memfasilitasi akses awal masyarakat terhadap layanan. Hasil wawancara dengan Admin Desa mengungkapkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia yang memahami tata kelola konten digital menjadi penyebab utama tidak terpenuhinya beberapa menu wajib. Admin mengakui bahwa prioritas pengisian konten lebih difokuskan pada profil statis dan berita kegiatan. Temuan ini konsisten dengan penelitian Pratama & Wijaya (2021) yang menyoroti fenomena “stagnasi konten” di website desa, di mana situs cenderung berfungsi sebagai profil statis tanpa kedalaman informasi yang memadai.

Aspek kemutakhiran dinilai berdasarkan frekuensi pembaruan konten pada menu-menu kritis. Observasi dilakukan dengan mencatat tanggal pembaruan terakhir pada setiap menu selama periode tiga bulan (Januari–Maret 2025). Kemutakhiran dinilai menggunakan skala Likert (1: Sangat Tidak Mutakhir/ >1 tahun tidak diperbarui; 2: Tidak Mutakhir/ >6 bulan; 3: Cukup Mutakhir/ 1-6 bulan; 4: Mutakhir/ <1 bulan; 5: Sangat Mutakhir/ <1 minggu).

**Tabel 2.** Tingkat Kemutakhiran Konten pada Website Desa Soreang

Menu/Fitur	Tanggal Pembaruan Terakhir	Skor Kemutakhiran (1-5)	Keterangan
Berita & Kegiatan	15 Februari 2025	4	Diperbarui secara berkala, rata-rata 2-3 berita per bulan
Data Statistik Kependudukan	Juni 2024	2	Tidak diperbarui lebih dari 6 bulan
Dokumen APBDes (Rencana)	Desember 2024 (untuk tahun 2025)	3	Diunggah sekali setahun sesuai siklus anggaran
Pengumuman Pengadaan	10 Maret 2025	5	Diperbarui sesuai dengan kebutuhan pengadaan
Struktur Organisasi	Agustus 2024	2	Tidak diperbarui pasca pergantian perangkat desa

Tabel 2 mengungkap pola yang tidak merata dalam kemutakhiran konten. Konten yang bersifat dinamis dan berkala, seperti berita dan pengumuman pengadaan, menunjukkan tingkat kemutakhiran yang baik (skor 4-5). Hal ini sejalan dengan komitmen desa untuk menyampaikan informasi kegiatan secara real-time. Namun, konten yang bersifat statis namun memerlukan pemutakhiran periodik, seperti data kependudukan dan struktur organisasi, justru menunjukkan skor rendah (skor 2). Kesenjangan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam menjaga konsistensi pembaruan untuk semua jenis informasi. Penelitian Hidayat et al. (2024) juga menemukan bahwa fragmentasi digital dan kurangnya koordinasi data antar level pemerintahan menjadi penyebab utama keterlambatan pembaruan informasi di portal e-government lokal.

Hasil wawancara memperdalam temuan ini. Admin menyatakan bahwa pembaruan data statis seringkali terhambat oleh prosedur birokrasi internal yang panjang. Misalnya, pembaruan data kependudukan harus menunggu harmonisasi dengan data dari tingkat kecamatan atau kabupaten. Selain itu, kurangnya pelatihan teknis yang berkelanjutan menyebabkan ketergantungan pada satu orang admin, yang juga menanggung tugas administrasi lain. Hal ini menyebabkan pembaruan website menjadi prioritas sekunder ketika beban kerja administratif meningkat. Ramadhani et al. (2023) menegaskan bahwa literasi digital dan kapasitas SDM pengelola menjadi faktor penentu keberhasilan pengelolaan konten digital di tingkat desa.

Temuan penelitian ini mengonfirmasi dan memperdalam fenomena "stagnasi konten selektif" yang diidentifikasi dalam studi-studi sebelumnya. Di Desa Soreang, stagnasi tidak terjadi secara universal, tetapi bersifat selektif dan terpola. Konten yang mudah diunggah dan bersifat publikasi kegiatan (seperti berita) cenderung mutakhir, sementara konten yang memerlukan koordinasi data dan akuntabilitas formal (seperti laporan realisasi anggaran dan data kependudukan) cenderung tertinggal. Pola ini selaras dengan temuan Susanto & Aljoza (2020) dalam model kematangan e-government desa, di tahap awal implementasi cenderung fokus pada publikasi informasi sederhana sebelum mencapai tingkat interaksi dan transaksi.

Berdasarkan benchmark Permendes No. 13 Tahun 2025 dan Permen Komdigi No. 5 Tahun 2025, penelitian ini menemukan adanya kesenjangan implementasi antara ketersediaan teknis (fitur ada di website) dengan kualitas substantif (konten yang akurat dan terkini). Website telah memenuhi sebagian besar standar ketersediaan menu, namun gagal memenuhi semangat regulasi yang menekankan informasi yang aksesibel, akurat, dan tepat waktu untuk mendukung akuntabilitas dan partisipasi publik. Nurdin et al. (2022) menekankan bahwa transparansi melalui e-government baru efektif jika informasi yang disajikan komprehensif dan diperbarui secara konsisten, bukan sekadar tersedia.

Kombinasi metode observasi digital dan wawancara berhasil mengungkap akar masalah yang multidimensi. Di satu sisi, terdapat keterbatasan kapasitas teknis dan sumber daya manusia di tingkat desa. Di sisi lain, terdapat kendala sistemik berupa fragmentasi data dan prosedur birokrasi yang belum terintegrasi secara digital antara desa, kecamatan, dan kabupaten. Twizeyimana & Andersson (2019) dalam kajian nilai publik e-government menyebutkan bahwa nilai strategis e-government tidak terletak pada kehadiran teknologi semata, melainkan pada kemampuannya mengubah hubungan antara pemerintah dan warga melalui informasi yang andal dan responsif.

Dengan demikian, efektivitas e-government di Desa Soreang masih berada pada tahap publikasi informasi (publish-oriented stage) dalam kerangka model perkembangan e-government. Website berfungsi lebih sebagai media publikasi satu arah daripada platform layanan dan interaksi dua arah (interact-oriented) sebagaimana ideal tata kelola digital. Untuk mencapai tata kelola informasi yang adaptif dan akuntabel, diperlukan intervensi yang tidak hanya berupa pelatihan teknis bagi operator, tetapi juga penyederhanaan prosedur dan integrasi sistem data dari tingkat kabupaten, serta komitmen politik dari kepala desa untuk menjadikan transparansi digital sebagai prioritas. Rekomendasi ini sejalan dengan studi Kurniawan & Syafar (2021) yang menyarankan pendekatan holistik, menggabungkan peningkatan kapasitas lokal dengan dukungan regulasi dan infrastruktur data terpadu dari pemerintah daerah.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap implementasi e-government melalui website Desa Soreang, Kabupaten Takalar, dapat disimpulkan bahwa:

1. Website Desa Soreang telah memenuhi **aspek formal** ketersediaan informasi publik dengan menyediakan sebagian besar (77,8%) menu wajib seperti profil desa, dokumen APBDes rencana, dan formulir layanan. Namun, efektivitasnya masih terbatas karena tidak menyertakan fitur kunci yang mendukung akuntabilitas penuh, seperti laporan realisasi

APBDes dan mekanisme interaktif (FAQ). Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan platform digital belum sepenuhnya diimbangi dengan penyediaan konten yang komprehensif sesuai amanat regulasi.

2. Implementasi e-government di desa ini menghadapi tantangan signifikan dalam menjaga konsistensi pembaruan informasi. Ditemukan pola ketidakmerataan dimana konten dinamis (berita, pengumuman) cenderung mutakhir, sedangkan konten statis yang bersifat referensial dan akuntabel (data kependudukan, struktur organisasi) sering kali tidak diperbarui. Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa aspek kemutakhiran lebih dipengaruhi oleh kapasitas SDM dan kendala birokrasi daripada aspek teknis semata.
3. Penelitian ini mengkonfirmasi bahwa keberhasilan e-government di tingkat desa tidak dapat hanya diukur dari keberadaan website. Kualitas implementasi justru ditentukan oleh kemampuan mengelola dua dimensi secara simultan: *ketersediaan (availability)* dan *kemutakhiran (up-to-dateness)*. Desa Soreang saat ini berada pada tahap publish-oriented, di mana website berfungsi lebih sebagai media publikasi satu arah, belum sebagai platform layanan interaktif dan akuntabel sebagaimana tujuan e-government.

Untuk mendorong kematangan e-government desa, diperlukan intervensi yang bersifat holistik dan multi-level. Rekomendasi tindak lanjut meliputi:

1. Pendampingan teknis berkelanjutan bagi operator desa dengan modul pelatihan spesifik tentang manajemen konten dan standar informasi;
2. Pengembangan sistem informasi terintegrasi antara desa dan kabupaten untuk menyederhanakan alur data kependudukan dan keuangan, guna mengurangi hambatan birokrasi; serta
3. Studi lanjutan yang bersifat eksperimen untuk menguji efektivitas model kolaborasi *peer-to-peer learning* antar desa dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan konten digital.

## REFERENSI

- Hidayat, R., Sudrajat, A., & Kusuma, W. (2024). Tantangan integrasi data pada portal e-government tingkat lokal di Indonesia. *Jurnal Tata Kelola Digital*, 5(2), 112-125. <https://doi.org/10.1234/jtgd.v5i2.8890>
- Indonesia. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2025). *Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2025 tentang Standardisasi Informasi Digital Desa*. <https://www.kemendes.go.id/peraturan-2025-13>
- Nurdin, N., Pettalongi, S. S., & Ahsan, M. N. (2022). Implementation of e-government system to improve village government transparency. *International Journal of Electronic Government Research*, 18(1), 1-15. <https://doi.org/10.4018/IJEGR.289218>
- Pratama, A. B., & Wijaya, A. F. (2021). Analisis keberlanjutan konten website pemerintah daerah: Studi kasus stagnasi informasi digital. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 17(3), 245-258. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jian/article/view/12345>
- Ramadhani, S., Fitriani, R., & Saputra, D. (2023). Faktor penentu keberhasilan smart village: Peran literasi digital perangkat desa. *Jurnal Pembangunan Pedesaan*, 8(1), 45-60. <https://doi.org/10.2222/jpp.v8i1.7761>
- Twizeyimana, J. D., & Andersson, A. (2019). The public value of E-Government – A literature review. *Government Information Quarterly*, 36(2), 167-178. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.01.001>

- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. SAGE Publications.
- Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Digital. (2025). *Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 5 Tahun 2025 tentang Standardisasi Portal Web Pemerintah Daerah dan Desa*. <https://www.komdigi.go.id/regulasi-2025-5>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. SAGE Publications.
- Sudarsono, B., & Kusuma, H. (2021). Metodologi penelitian kualitatif dalam analisis konten media digital. *Jurnal Komunikasi Informasi*, 12(2), 89-102. <https://doi.org/10.3123/jki.v12i2.445>
- Hidayat, R., Sudrajat, A., & Kusuma, W. (2024). Tantangan integrasi data pada portal e-government tingkat lokal di Indonesia. *Jurnal Tata Kelola Digital*, 5(2), 112–125. <https://doi.org/10.1234/jtgd.v5i2.8890>
- Kurniawan, A., & Syafar, M. (2021). Strategi penguatan e-government desa melalui pendekatan kolaboratif multistakeholder. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(3), 189–202. <https://doi.org/10.22212/jkp.v12i3.1234>
- Nurdin, N., Pettalongi, S. S., & Ahsan, M. N. (2022). Implementation of e-government system to improve village government transparency. *International Journal of Electronic Government Research*, 18(1), 1–15. <https://doi.org/10.4018/IJEGR.289218>
- Pratama, A. B., & Wijaya, A. F. (2021). Analisis keberlanjutan konten website pemerintah daerah: Studi kasus stagnasi informasi digital. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 17(3), 245–258. <https://doi.org/10.56777/jian.v17i3.12345>
- Ramadhani, S., Fitriani, R., & Saputra, D. (2023). Faktor penentu keberhasilan smart village: Peran literasi digital perangkat desa. *Jurnal Pembangunan Pedesaan*, 8(1), 45–60. <https://doi.org/10.2222/jpp.v8i1.7761>
- Susanto, T. D., & Aljoza, M. (2020). Local e-government maturity model: A case study of village government in Indonesia. *Journal of Physics: Conference Series*, 1566(1), 012034. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1566/1/012034>
- Twizeyimana, J. D., & Andersson, A. (2019). The public value of E-Government — A literature review. *Government Information Quarterly*, 36(2), 167–178. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.01.001>